



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance Pada BUMN
PT.INTI

Skripsi

Oleh

Muhammad Fadhil Abdurazzaq

2012310059

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance Pada BUMN

PT.INTI

Skripsi

Oleh

Muhammad Fadhil Abdurazzaq

2012310059

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Muhammad Fadhil Abdurazzaq
Nomor Pokok : 2012310059
Judul : Implementasi Good Corporate Governance Pada BUMN PT.INTI

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 25 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si : _____

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M.Si : _____

Anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil Abdurazzaq

NPM : 2012310059

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Good Corporate Governance Pada BUMN PT.INTI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 juli 2019

Muhammad Fadhil Abdurazzaq

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fadhil Abdurazzaq
NPM : 2012310059
Judul : Implementasi *Good Corporate Governance* Pada BUMN
PT.INTI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan *good corporate governance* yang dilakukan oleh salah satu BUMN yaitu PT.INTI sebagai salah satu pelaksana kebijakan. Acuan dasar kebijakan dalam penelitian ini adalah PER — 01 /MBU/2011 tentang Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design penelitian studi kasus di PT. INTI. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan mengamati situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, wawancara dengan 5 staff terkait pelaksanaan prinsip-prinsip di dalam *good corporate governance*, dan studi dokumen yang ditemukan di lapangan berupa Laporan Assesment Good Corporate Governance. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. INTI telah menjalankan setiap kegiatan perusahaan dengan mengacu pada PER — 01 /MBU/2011 tentang Good Corporate Governance. Dengan kata lain PT. INTI telah menimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Setiap aspek didalam kebijakan tersebut diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran telah diimplementasikan oleh PT. INTI dengan baik.

Keyword: kebijakan, implementasi kebijakan, *good corporate governance*

ABSTRACT

Name : Muhammad Fadhil Abdurazzaq
NPM : 2012310059
Title : Implementation of Good Corporate Governance on Indonesian State-owned Enterprises PT.INTI

This paper aims to see the process of the implementation of good corporate governance policy done by one of Indonesian state owned enterprises, PT.INTI. The main policy reference being used in this research is PER — 01 /MBU/2011 about Good Corporate Governance which included such aspects as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

This research is a qualitative research method with case study research design located at PT.INTI. The author uses data collection through observation and looking at real situation and condition in the field related to the implementation of good corporate governance principles, interviews with 5 related staffs relating the implementation of good corporate governance principles, and document studies found in the field in the form of Good Corporate Governance Assesment Report. Data analysis is done descriptively to achieve deep pictures about the research object.

The result of this research indicated that each steps taken by PT.INTI is referred to PER — 01 /MBU/2011 about Good Corporate Governance. In other words, PT.INTI has implemented the policy precisely. The company has exactly done each aspects of the policy, consisting transparency, accountability, responsibility, independency, fairness.

Keyword: policy, policy implementation, good corporate governance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi kebijakan PER — 01 /MBU/2011 tentang Good Corporate Governance (studi kasus di PT.INTI)”.

Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai dan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik dengan jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Katholik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini dapat dikatakan masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kesalahan yang mungkin penulis buat diakibatkan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh dengan adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi yang diberikan oleh beberapa pihak. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Pius Sugeng selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan membantu dalam membimbing penulis dan untuk waktu yang sangat berharga, telah diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bpk. R. Bambang Achmadi dan Ibu Elly Darsiah atas segala pengorbanan, kasih sayang, cinta, kasih, yang selalu memberikan motivasi, khususnya doa yang tak kunjung usai sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Tutik Rachmawati, S.IP., MA.,Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Gina, Ibu Indraswari, Ibu Ani Susana, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Bapak Ulber, Bapak Hubertus, Kristian Widya Wicaksono , Kang Gaga, Mas Andoko dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Untuk Para sahabat seperjuangan selama dari awal kuliah sampai saat ini Tubagus Axell, Recky Ramdhani, Dio Ghisa, Doni Alfiansyah, Rama Akbar, Ismail Akbar, Vijay Asti, Rian Pandu, Taufik Rahmantoro, Andrew Alfred, dan Raykevin yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan dan membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Semoga persahabatan ini selamanya hingga waktu yang memisahkan.
5. Untuk teman-teman perkuliahan keluarga besar Putri Khansa, Laras Pertiwi, Lidya, Shanty Ramdhani, Jovanscha Qisty, Diah Ayu, Audia Dara, Descha Candra, Fadila Khoirunisa, Reksa Hartoyo, Rina S, Selly Alfani, Nurul Varisha, yang sudah membantu selama perkuliahan dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan kuliah, doa terbaik untuk kalian.
6. Untuk keluarga teras familia yang sudah menjadi keluarga sejak kecil, Raihan Adiprima, Andi Taufik Manggabarani, Agistian Faturizki, Ekky Rizky Mulyana, Rinaldi Ramadhan, Kuntara Adji Dahyar, Ady Hartono, Anggih Dianata, Lutfi Hakim, Zaky Hidayat, Matin Gufron, Akbar, Nugraha Aulia, Tubagus Axell, Doni Alfiansyah, Gaya Bayu, Aditya PG, yang telah

membantu membuat pribadi yang lebih baik dan juga yang selalu motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini, sukses selalu dan doa terbaik untuk kalian.

7. Untuk Michelle Tjandra yang telah menjadikan saya pribadi yang lebih baik dan terus menyemangati dan memotivasi dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dan juga menyelesaikan perkuliahan. Semoga sukses selalu dan doa terbaik untuk anda.
8. Untuk para Staff PT. INTI yang sudah bersedia memberikan data dan diwawancara dan membantu selesainya skripsi ini.
9. Teman-Teman Fisip dan khususnya keluarga besar Administrasi Publik 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kerjasama, canda tawa, keluh kesah yang telah dilalui bersama.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu menyertai keluarga dan sahabat yang telah mendoakan dengan sepenuh hati kepada penulis. Semoga skripsi yang telah dikerjakan ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Dan seluruh pihak yang juga tak bisa disebutkan semuanya yang telah berkontribusi dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, di manapun kalian berada terima kasih banyak, doaku selalu menyertai kalian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
Bab I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Sistematika Penelitian	12
Bab II	14
2.1 Kebijakan Publik.....	14
2.1 Implementasi Kebijakan	16
2.2 Good Corporate Governance	19
2.3 Model Penelitian	29
BAB III	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Peran Peneliti	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	34

3.4 Operasionalisasi Variabel	34
3.5 Pengumpulan data.....	35
3.6 Analisis data.....	36
BAB IV	37
4.1 Profil PT. INTI.....	37
4.2 Tugas Pokok PT. INTI.....	39
4.3 Dasar Hukum	39
4.4 Visi dan Misi PT. INTI	42
4.4.1 Visi	42
4.4.2 Misi.....	42
4.5 Struktur Organisasi	44
BAB V	45
5.1.1 Tranparansi	55
5.1.2 Akuntabilitas	59
5.1.3 Responsibilitas	65
5.1.4 Kemandirian.....	69
5.1.5 Kewajaran	73
BAB VI.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR GAMBAR

2.3 Model Penelitian.....	29
4.5 Struktur organisasi.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Interview Guide
- Lampiran 2 : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR: PER — 01
/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA.
- Lampiran 3 : Kartu bimbingan skripsi

Bab I

Pendahuluan

I.I Latar Belakang

Di Indonesia terdapat badan usaha yang dimiliki oleh Negara, yang biasa disebut Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat menjadi BUMN. Pengertian Badan Usaha Milik Negara Secara umum (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping Badan Usaha Swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi¹.

¹ www.artikelsiana.com . Diunduh pada tanggal 14 maret 2016 pukul 20.00

Adanya Badan Usaha Milik Negara ini diatur oleh pemerintah yaitu terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003. Dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003 ini bahwa² :

- Bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi
- Bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
- Bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara;

² www.jdih.kemenkeu.go.id . Diunduh pada tanggal 14 maret 2016 pukul 20.20

Didalam Undang-undang ini juga dijelaskan bagaimana maksud dan tujuan didirikannya BUMN³, yaitu diantaranya:

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

1. mengejar keuntungan;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
3. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
4. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Adanya BUMN juga memberikan beberapa manfaat yang cukup banyak bagi Negara dan juga bagi masyarakat. BUMN memberikan maanfaat⁴ :

1. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
2. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.

³ www.jdih.kemenkeu.go.id . Diunduh pada tanggal 14 maret 2016 pukul 20.20

⁴ id.wikipedia.org . Diunduh pada tanggal 14 maret 2016 pada pukul 21.00

3. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.
5. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk BUMN. Di antaranya adalah perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan⁵. Salah satu BUMN yang ada di Indonesia dan yang akan penulis bahas disini adalah PT.INTI. PT.INTI merupakan salah satu perusahaan persero di Indonesia.

PT.INTI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang berada Di bawah Pengelola Industri Telekomunikasi Stategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi. PT.INTI (Persero) merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan yang menjelma dari kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi.

⁵ *loc. cit*

Berbagai macam kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam mengatur berjalannya BUMN agar maksud dan tujuan didirikannya BUMN dapat terlaksana. Terdapat salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan BUMN yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan *Good Corporate Governance*. Kebijakan ini mengatur bagaimana tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Menurut Komite Cadbury, *GCG* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu⁶.

Di Indonesia, *GCG* diterjemahkan sebagai konsep pengaturan. Salah satu topik utama dalam *GCG* adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab / mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa konsep *GCG*

⁶ diaryintan.wordpress.com . Diunduh pada tanggal 15 april 2016 pukul 19.00

harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan⁷.

Konsep *GCG* ini juga ditekankan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* dan PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER — 01 /MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut⁸ :

1. Transparansi;

Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya mengumukan pendirin PT dalam Tambahan Berita Negara Republik

⁷ diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-2/ . Diunduh pada tanggal 15 maret 2016 pukul 15.00

⁸ ferli1982.wordpress.com/2013/02/11/pelaksanaan-good-corporate-governance-gcg-dalam-undang-undang-no-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas/ . Diunduh pada tanggal 15 maret 2016 pada pukul 16.30

Indonesia ataupun Surat Kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan management keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada shareholders maupun stakeholder.

2. Akuntabilitas;

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independent mutlak diperlukan kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan

3. Responsibility;

Pertanggung jawaban perseroan baik kepada shareholders maupun stakeholder dengan tidak merugikan kepentingan para shareholders maupun anggota masyarakat secara luas. Yang ditekankan dalam UU ini perseroan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku.

4. Fairness.

Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan baik itu pelanggan, share holders ataupun masyarakat luas.

5. Selain itu prinsip keadilan ini tercermin dalam Pasal 53 ayat 2 “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Pasal ini menunjukkan unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti Hak untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUPS dan lain-lain.

Selain itu, didalam peraturan menteri: PER — 01 /MBU/2011⁹ dijelaskan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Didalam peraturan menteri ini juga terdapat penjelasan mengenai prinsip GCG¹⁰, yaitu:

- Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

⁹ PER — 01 /MBU/2011

¹⁰ *loc. cit*

- Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Didalam PerMen BUMN nomor Per-01/MBU/2011 menjelaskan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Prinsip GCG ini bertujuan untuk¹¹:

- mengoptimalkan nilai BUMN
- mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif

11

- dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
- meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Jadi, dengan mengimplementasikan kebijakan *GCG* dengan baik maka akan membantu performa perusahaan kearah yang lebih baik. Namun akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di PT.INTI adalah proses implementasi dan performa tidak sebanding lurus. Maka perlu diketahui apakah terjadi kesalahan didalam proses implementasinya. Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan elemen-elemen *GCG*, diantaranya adalah yang pertama berkaitan dengan transparansi. PT.INTI telah menyediakan informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat dan berkala, dengan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para stakeholders. Selain itu PT.INTI mendapat peringkat ke 9 dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). PT. INTI menyediakan layanan informasi melauli email dan website. Namun dalam pengambilan keputusan, tidak terlihat adanya pengambilan keputusan secara terbuka. Yang kedua mengenai akuntabilitas. PT.INTI telah memberikan kejelasan mengenai fungsi, pembagian tugas dan wewenang kepada para direksi dan komisaris. Yang ketiga adalah responsibilitas. Sejauh ini PT.INTI telah melakukan pertanggung jawaban hasil kerja secara teratur kepada stakeholders dan juga shareholders.

PT.INTI juga telah melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah kemandirian. Berkaitan dengan kemandirian, PT.INTI dalam melakukan pengelolaan perusahaan tidak ditemukan adanya benturan kepentingan. Dan yang terakhir adalah kewajaran. PT. INTI memberikan seluruh karyawannya kesempatan yang sama dalam berkarir melalui job tender dan memberikan kesempatan terbuka bagi para calon pejabat eselon 1 yang dilaksanakan melalui fit and poper, serta kesempatan terbuka para calon pejabat direktur dan anak perusahaan ataupun direktur perusahaan dilakukan secara fit and proper. Dan PT. INTI melakukan pengadaan karyawan dengan cara pola rekrutmen online¹².

Berdasarkan penjelasan diatas maka bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* yang diterapkan di PT.INTI dilihat dari 5 hal yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

¹² hasil interview dengan Elly Darsiah sebagai Ka.Bag. Keuangan SBU DDS & Asesor Self Assesment GCG di PT.INTI. Pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019

Bagaimana implementasi *good corporate governance* dilihat dari transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran di PT.INTI?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* di PT.INTI berdasarkan transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara praktis, penelitian ini juga menjadi bahan pembelajaran penulis dan juga dapat menjadi masukan bagi PT. INTI mengenai proses implementasi kebijakan *Good Corporate Governance*.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* pada BUMN PT.INTI. Untuk itu sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab II kerangka

Konseptual, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Profil Penelitian, Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan.